

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, dan Kompleksitas Pemerintahan terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website

Sophi Dezalinda^{1*}, Mayar Afriyenti²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

*Korespondensi: sophidezalinda@gmail.com

Tanggal Masuk:

23 Januari 2024

Tanggal Revisi:

24 Maret 2024

Tanggal Diterima:

26 April 2024

Keywords: *Financial Information; Government Complexity; Regional Original Income; Regional Spending; Transparency.*

How to cite (APA 6th style)

Dezalinda, S., & Afriyenti, M. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah dan Kompleksitas Pemerintahan terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 6 (2), 540-550.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v6i2.1502>

Abstract

The aim of this study is to offer actual data on the impact of local income, regional spending, and governmental complexity on the accessibility of regional financial data online in Indonesia. Based on the accessibility of acquiring regional financial information with three years of research observation, this study looks at the transparency of financial information on government websites in 34 Indonesian provinces. Multiple linear regression analysis was used to test this study. The research's conclusions indicate that local original income significantly improves the accessibility of regional financial data on websites. However, regional expenditure variables and government complexity have no influence on the transparency of regional financial information via the website. This result supports the signal theory, which holds that a high level of local revenue signifies that the government is successfully discharging its obligations to the community. The results of this study can be utilized by local governments to establish internal or external laws, improving the transparency of financial data on local government websites going forward.



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Isu utama pada pemerintahan demokratis ialah transparansi. Peningkatan transparansi sangat krusial pada pengawasan aktivitas, mencegah masalah korupsi serta penyalahgunaan sumber daya publik yang mengakibatkan gangguan administrasi. Menurunnya minat terhadap kehidupan politik dan pemerintahan dari rakyat yang terputus serta tak jarang diabaikan pada proses tersebut, serta pengambilan keputusan politik terancam oleh kurangnya transparansi, seperti korupsi. Hal ini mengakibatkan rakyat tidak mempercayai institusi pemerintah sebagai akibatnya, enggan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan rakyat yang sebenarnya.

Transparansi melalui situs web sudah diperkenalkan di Indonesia. Masyarakat dapat memperoleh pemahaman wacana potensi daerah dan menerima informasi perihal aktivitas pemerintahan dan keuangan melalui website pemerintah yang merupakan implementasi dari e-government. Siapa pun dapat mengakses website ini, mendeskripsikan adanya bentuk transparansi. Pada Indonesia, pemerintah telah mulai memakai website sebagai sarana komunikasi. Langkah ini ditunjukkan dari diterbitkannya Instruksi Presiden angka 6 Tahun 2001 dan lebih lanjut ditegaskan oleh Instruksi Presiden angka 3 Tahun 2003. Berawal dari itu, hampir semua pemerintah di Indonesia telah mempunyai situs web resmi, namun masih belum memanfaatkan sepenuhnya. Pemerintah sebaiknya memberikan perhatian lebih terhadap laman website resmi demi memastikan pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan agar dapat diakses secara seksama bagi warga, sehingga *pemanfaatan e-government* dapat dioptimalkan.

Selama ini setiap pemerintah provinsi di Indonesia sudah mempunyai website resmi namun, pemerintah tidak memanfaatkannya secara maksimal. Hal ini terlihat pada data survei tahun 2020 yang diperoleh dari laman layanan Kementerian Pemberdayaan lembaga Publik serta Reformasi Birokrasi mengenai penggunaan portal online yang digunakan oleh seluruh pemerintah Indonesia sebagai wujud e-governance. Indonesia menduduki peringkat ke-88 dari 193 negara pada penggunaan portal resmi pemerintah dan peringkat ke-57 pada hal partisipasi masyarakat serta kebutuhan isu publik. Direktorat Jenderal Pembangunan Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri mencatat kepatuhan terhadap tujuan Instruksi Presiden angka 7 Tahun 2015 wacana penerapan transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran daerah (TPAD), mengingat masih ada daerah provinsi yang mempunyai kuota 0.% tingkat keberhasilan (Dewi, V.I, 2019).

Dalam penelitian ini memiliki tiga variabel x atau variabel independen yakni pendapatan asli daerah, belanja daerah dan kompleksitas pemerintahan. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Belanja daerah termasuk informasi penting yang harus disajikan karena belanja daerah memberikan gambaran terhadap pengeluaran publik yang diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Semakin tinggi belanja daerah maka semakin tinggi tingkat pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Semakin tinggi tingkat pelayanan, semakin besar tanggung jawab pemerintah untuk menyampaikan informasi tentang pelayanan sosial kepada masyarakat secara tidak langsung. Kompleksitas pemerintahan merupakan suatu indikator yang mempengaruhi cara bagaimana hubungan dalam sistem pemerintahan dikelola. Kompleksitas pemerintahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk. Perbedaan riset ini dengan riset yang dilakukan sebelumnya yakni adanya disparitas tahun penelitian. Observasi data penelitian selama tiga tahun dipergunakan untuk menguji transparansi yang penekanan di kemudahan memperoleh info keuangan untuk melihat sejauh mana transparansi pada pemerintah provinsi terhadap data keuangan yang dipublikasikan melalui situs resmi pemerintah.

Tujuan penelitian ini ialah buat menguji efek pendapatan asli daerah, belanja daerah serta kompleksitas pemerintahan terhadap transparansi informasi keuangan daerah melalui website pemerintah provinsi. Kontribusi yang dapat diberikan dengan dilakukannya penelitian ini adalah: 1) mendukung peningkatan transparansi informasi keuangan daerah melalui website. Hal ini akan memungkinkan masyarakat untuk memantau korupsi dan memperjelas kebijakan negara untuk mencapai transparansi informasi. 2) mendukung pemerintah untuk meningkatkan hubungan pemerintah dan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. 3) membantu pemerintah mengungkapkan informasi keuangan

yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, sehingga membantu masyarakat mengevaluasi kinerja pemerintah. 4) membantu pemerintah mengelola sumber daya publik dan informasi publik untuk menjamin akses atau kebebasan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan.

REVIEW LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori sinyal dikemukakan oleh Michael Spence pada tahun 1973. Teori sinyal menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tanggung jawab publik akan berusaha mengirimkan sinyal yang baik kepada masyarakat. Pemerintah menyediakan laporan keuangan yang berkualitas, meningkatkan pengendalian internal, merupakan bentuk sinyal kepada publik dengan transparansi yang lebih baik dan pelaporan yang lebih rinci. Dilihat dari teori sinyal atau signalling theory, hubungan pendapatan asli daerah, belanja daerah dan kompleksitas pemerintahan dapat dikaitkan dengan konsep transparansi pengelolaan keuangan daerah. Transparansi adalah asas keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan memperoleh informasi sebanyak-banyaknya mengenai keuangan daerah.

Dalam sudut pandang teori sinyal, pendapatan asli daerah, belanja daerah dan kompleksitas pemerintahan dapat dilihat sebagai sinyal yang akan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai keberadaan dan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengelola keuangan daerah dan penyelenggaraan perekonomian daerah, sebagai sinyal untuk melihat indikator tingkat pelayanan publik diberikan pemerintah. Teori sinyal ini menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, diharapkan pemerintah dapat memperbaiki dan memperkuat transparansi informasi keuangan daerah melalui website. Hal ini membantu masyarakat memantau perilaku korupsi, memperjelas kebijakan pemerintah, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah, memperkuat kohesi dan membantu pemerintah mengelola sumber daya publik.

Transparansi

Keterbukaan informasi secara aktif dilakukan oleh suatu organisasi atau badan tertentu dengan tujuan agar masyarakat dan pemangku kepentingan lain dapat mengumpulkan dan mengevaluasi kinerja organisasi (Grimmelikhuijsen, 2010 dalam Krah, et al 2020). Penelitian ini mengukur transparansi dengan menggunakan aksesibilitas sebagai parameter pengukuran. Aksesibilitas adalah tentang bagaimana orang dapat dengan mudah mendekati suatu objek, layanan, atau lingkungan. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan betapa mudahnya memperoleh informasi laporan keuangan disebut dengan aksesibilitas laporan keuangan (Fauziyah, 2017: 4 dalam Arumanti, NR 2018).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) merupakan dokumen yang menjelaskan bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam memanfaatkan perekonomian daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah.. Laporan keuangan daerah, menurut Mahsun (2018) sebagaimana yang dikutip oleh Hiola dan Harun (2021), merupakan produk dari proses akuntansi keuangan daerah yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Tujuan laporan ini adalah untuk memberikan informasi kepada berbagai pihak yang memiliki kepentingan, baik dari internal maupun eksternal.

Pendapatan Asli Daerah

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan pendapatan asli daerah dari wilayah tersebut. Pendapatan asli daerah berfungsi sebagai sarana pemberdayaan pemerintah daerah untuk membiayai realisasi otonomi daerah sebagai wujud desentralisasi, sesuai dengan kapasitas daerah.

Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-undang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Nomor 1 Tahun 2022, Belanja daerah adalah seluruh kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih selama anggaran yang bersangkutan. Tujuan belanja daerah adalah untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan daerah maka semakin mampu dan mandiri daerah tersebut dalam membiayai belanja daerahnya.

Kompleksitas Pemerintahan

Ada banyak hal dan perbedaan yang mempengaruhi keadaan ini secara langsung maupun tidak langsung. Masalah suatu pemerintahan ditentukan oleh jumlah orang yang tinggal didalamnya. Liestiani, 2008 dalam Ningsih RF (2018), berpendapat bahwa jumlah penduduk suatu daerah yang mencerminkan tingkat permintaan terhadap penyediaan pelayanan publik di daerah tersebut.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah via Websit

Sebagai entitas yang terpercaya, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memberikan sinyal kepada masyarakat dengan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, memberikan informasi yang lebih lengkap dan penjelasan yang lebih rinci. Menurut penelitian (Verawaty, 2017), pendapatan asli daerah (PAD) ternyata mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat transparansi informasi keuangan di daerah. Oleh karena itu, kita dapat mengajukan hipotesis berikut:

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah via *website*.

Pengaruh Belanja Daerah terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah via Website

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2022 menyebutkan hal ini dilakukan dengan belanja daerah untuk kepentingan publik, seperti peningkatan aksesibilitas layanan publik, infrastruktur yang memadai, pendidikan yang berkualitas, serta pelayanan kesehatan yang memadai. Dalam pelaksanaannya, belanja daerah juga harus memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik. Selain itu, belanja daerah juga harus mengutamakan kepentingan masyarakat secara umum, termasuk masyarakat yang berada di daerah terpencil dan daerah yang kurang berkembang. Menurut Rosita dan Arifin (2017) & Saputri dan Yuliantoro (2019) menemukan bahwa terdapat pengaruh yang positif secara signifikan antara belanja daerah dan transparansi informasi keuangan melalui situs web. Dengan demikian, dapatlah disusun suatu hipotesis sebagai berikut:

H2: Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah via *website*.

Pengaruh Kompleksitas Pemerintahan terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah via Website

Kompleksitas model pemerintahan mengacu pada keragaman faktor dan tantangan yang terlibat dalam pemerintahan suatu wilayah atau negara. Dalam penelitian ini, kompleksitas tata kelola adalah kependudukan. Guillamon dkk (2011) dan Hendriyani (2015) menemukan bahwa variabel kompleksitas pemerintahan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap transparansi informasi keuangan yang tersedia melalui situs web. Oleh karena itu, kita dapat mengajukan hipotesis berikut:

H3: Kompleksitas pemerintahan berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah via *website*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menguji suatu populasi atau sampel guna menguji hipotesis penelitian. Penelitian kuantitatif ialah penelitian yang dilakukan untuk menguji sampel dan populasi tertentu,, mengumpulkan data dengan menggunakan alat survei, kegiatan analisis data, dan memverifikasi hipotesis riset (Sugiyono, 2017).

Populasi yang digunakan adalah laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia periode 2019-2021. Sampel akhir penelitian ini ialah 102 data, karena pengambilan sampel dilakukan menggunakan beberapa kriteria dan metode *purposive sampling*.

Data sekunder adalah data yang digunakan dalam penelitian ini. Salah satu jenis sumber data yang data langsung adalah data sekunder. Laporan hasil pemeriksaan BPK dan BPS merupakan sumber data penelitian. Tinjauan pustaka dan pendekatan dokumentasi merupakan strategi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dari dokumen-dokumen terkait, seperti laporan keuangan pemerintah provinsi dibawah administrasi BPK periode 2019-2021, merupakan bagian dari pendekatan dokumentasi. Di sisi lain, pendekatan analisis sastra memerlukan pengumpulan informasi dari berbagai penelitian sebelumnya dengan menggunakan bahan tertulis seperti buku, jurnal, dokumen, dan sumber tertulis lainnya.

Teknik Analisis Data

Analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS 25 merupakan teknik analisis data dalam penelitian ini. Analisis statistik deskriptif, uji kelayakan model menggunakan asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi), analisis linear berganda dan uji hipotesis adalah urutan langkah dalam pengujian data penelitian ini.

Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Variabel Dependen

Variabel adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Tingkat transparansi informasi keuangan daerah di seluruh *website* yang diukur berdasarkan kemudahan memperoleh informasi keuangan daerah ialah variabel terikat dalam penelitian ini. Indeks aksesibilitas yang dikembangkan oleh Styles & Tennyson (2007) dan juga digunakan dalam penelitian Fawziah & Fefri (2020) merupakan pengukuran untuk variabel terikat penelitian ini.

Variabel Independen

Variabel bebas ialah variabel yang mempengaruhi, artinya peneliti memilih faktor-faktor yang akan diukur untuk mengetahui hubungan antara peristiwa yang diamati.

Variabel dalam penelitian ini adalah sumber pendapatan, belanja daerah, dan kompleksitas pemerintahan..

Pendapatan Asli Daerah

Perbandingan antara pendapatan asli daerah yang diterima daerah dengan total aktual yang diterima merupakan pengukuran dari pendapatan asli daerah (Rora, 2010). Liestiani (2008) dalam Ningsih RF (2018) dan Adriana & Ritonga, IT (2018) menggunakan PAD sebagai indikator kekayaan atau kemandirian pemerintahan daerah. Dalam penelitian ini pendapatan asli daerah dihitung dengan cara membandingkan total pendapatan asli daerah dengan anggaran pendapatan sebenarnya.

$$\text{PAD} = \text{Total PAD} / \text{Total Realisasi Anggaran Pendapatan}$$

Belanja Daerah

Peraturan perundang-undangan nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan bahwa belanja daerah sebagai komitmen pemerintah daerah dinilai dapat menurunkan nilai kekayaan bersih. Dalam penelitian tersebut, variabel belanja daerah dihitung menggunakan log belanja daerah.

$$\text{BD} = \text{Log (Belanja Daerah)}$$

Kompleksitas Pemerintahan

Kompleksitas pemerintahan dapat diartikan sebagai situasi dimana berbagai faktor dengan karakteristik yang berbeda mempengaruhi pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung (Khasanah, 2014). Dalam penelitian ini kompleksitas pemerintahan dihitung menggunakan logaritma populasi.

$$\text{KP} = \text{Log (Populasi Penduduk)}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Subjek penelitian ini ialah 34 provinsi di Indonesia dengan masa tindak lanjut tiga tahun sesuai kriteria seleksi dan jumlah sampel 102 data.

Analisis Deskriptif

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	102	.043	.734	.35973	.150113
BD	102	12.203	13.807	12.75512	.342083
KP	102	5.840	7.698	6.64879	.438615
Transparansi	102	2	10	7.43	2.734
Valid N (listwise)	102				

Sumber Data: Data Sekunder yang diolah tahun 2023

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Tabel 2
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		102
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.28788820
Most Extreme Differences	Absolute	.077
	Positive	.073
	Negative	-.077
Test Statistic		.077
Asymp. Sig. (2-tailed)		.143 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber Data: Data sekunder yang diolah tahun 2023

Hasil uji normalitas diatas, dengan *test statistic* 0,077 dengan *Asymp. Sig.(2-tailed)* 0,143 lebih besar dari nilai 0,05 yang berarti data telah berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini menyatakan bahwa tidak terdapat adanya korelasi antar sesama variabel bebas, karena nilai *VIF* kurang dari 10 dan *tolerance value* berada diatas 0,10.

Uji Heterokedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menyatakan bahwa dalam penelitian ini masing-masing variabel tidak memiliki gejala heteroskedastisitas, terlihat dari nilai sig masing- masing variabel yakni PAD sebesar 0,073, BD sebesar 0,633, dan KP sebesar 0,288.

Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi pada penelitian menunjukkan bahwa nilai *d* adalah 2,189 yang berarti berada antara *dU* (1,7383) dan *(4-dU)* 2,2617. Ini berarti model regresi dalam penelitian ini tidak memiliki gejala autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 3
Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a			T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20.444	11.492		
	PAD	11.279	2.193	.619	5.144
	BD	-1.465	1.234	-.183	-1.188
	KP	.244	1.070	.039	.228

a. Dependent Variable: Transparansi

Uji F: 0,000

Uji Koefisien Determinasi: 0,278

Sumber Data: Data sekunder yang diolah tahun 2023

Berdasarkan hasil Tabel 3, diperoleh persamaan regresi linear berganda secara sistematis sebagai berikut:

$$Y = 20,444 + 11,279 \text{ PAD} - 1,465 \text{ BD} + 0,244 \text{ KP}$$

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinansi digunakan untuk mengukur sejauh mana variasi dalam variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Tabel 3 menunjukkan bahwa temuan uji koefisien determinasi, yang juga dikenal sebagai *R-Square* yang disesuaikan, dalam penelitian ini adalah 0,278, atau 27,8%. Temuan ini menunjukkan bahwa variabel terikat yaitu transparansi informasi keuangan daerah melalui website. Namun, faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini dapat menyumbang 72,2%.

Uji F (Simultan)

Untuk menguji bersama-sama faktor independen atau pengaruh variabel dependen digunakan uji f. nilai f yang ditentukan dari tabel dianalisis secara statistik dan diperoleh hasil $13,986 > 2,70$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen dalam model persamaan secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap variabel dependen.

Uji t (Parsial)

Untuk hipotesis pertama, nilai t hitung variabel PAD yaitu 5,144 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dapat dikatakan bahwa PAD sangat meningkatkan transparansi informasi keuangan daerah pada website karena nilai signifikansi dari t kurang dari 0,05 sehingga H1 dapat diterima. Hipotesis pertama disetujui.

Untuk hipotesis kedua, nilai t hitung variabel BD yaitu -1,188 dengan nilai signifikansi sebesar 0,238. Dapat disimpulkan bahwa BD tidak mempunyai pengaruh nyata terhadap kemampuan website dalam membuat informasi keuangan daerah menjadi transparan karena nilai sig t $> 0,05$ menyebabkan penolakan terhadap H2. Hipotesis kedua terbantahkan.

Untuk hipotesis ketiga, nilai t hitung variabel KP yaitu 0,228 dengan nilai signifikansi sebesar 0,820. Karena nilai sig. lebih besar dari 0,05 maka H3 ditolak sehingga dapat disimpulkan KP tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi informasi keuangan daerah melalui website. Hipotesis 3 ditolak.

PEMBAHASAN

Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap transparansi informasi keuangan daerah via website

Dari hasil statistik terlihat jelas jika PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat transparansi informasi keuangan daerah yang tersedia secara online, yang berarti hipotesis pertama diterima atau asumsi yang diajukan sebelumnya didukung dan konsisten terhadap temuan penelitian.

Menurut penelitian Jeckly dan Eka (2014), Alcaide Munoz, *et al* (2017), Verawaty (2017), Fawziah & Fefri (2018), dan Aggatha (2020), pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap derajat keterbukaan informasi keuangan daerah melalui website. Hasil ini konsisten dengan temuan penelitian tersebut. Pemerintah daerah dengan PAD tinggi menunjukkan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan bahwa mereka telah

menghasilkan produk yang berkualitas dan berkinerja tinggi. Administrasi publik yang baik ditandai dengan kinerja yang tinggi, sedangkan pemerintah daerah yang kinerjanya buruk akan berusaha menyembunyikan informasi yang terungkap dan ingin membatasi akses masyarakat terhadap informasi. Menurut teori sinyal, pemerintah daerah yang berkinerja baik akan memberikan lebih banyak informasi dan menerapkan strategi pengungkapan informasi yang lebih baik.

Pengaruh belanja daerah terhadap transparansi informasi keuangan daerah via *website*

Temuan statistik menunjukkan bahwa BD tidak memiliki dampak terhadap kemampuan situs web tersebut dalam membuat informasi keuangan daerah menjadi transparan. Oleh karena itu, hipotesis kedua ditolak atau hipotesis tersebut tidak konsisten dengan temuan penelitian.

Temuan studi ini menunjukkan bahwa jumlah belanja daerah yang besar tidak memberikan insentif kepada pemerintah daerah untuk mempublikasikan data keuangan secara transparan di situs web pemerintah provinsi masing-masing. Hal ini terutama disebabkan karena besarnya belanja pemerintah daerah tidak selalu berarti tingginya tingkat pelayanan masyarakat, sehingga BD hanya mempunyai dampak kecil atau tidak sama sekali terhadap kemampuan situs web tersebut untuk menampilkan data keuangan daerah secara transparan. Hasil statistik ini sesuai dengan penelitian (Agus Tubels & Dyah Purwanti, 2016) dan (Ningsih RF, 2018), yang tidak menemukan dampak nyata belanja daerah terhadap transparansi data keuangan daerah.

Pengaruh Kompleksitas pemerintahan terhadap transparansi informasi keuangan daerah via *website*

Dari temuan yang diperoleh diketahui jika KP tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap transparansi informasi keuangan daerah melalui website, oleh karena itu hipotesis yang diajukan tidak sesuai dengan hasil penelitian, atau dari hipotesis ketiga dapat disimpulkan ditolak. Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Naopal dkk. (2017), Ningsih RF (2018) dan Dewi V.I. (2019) yang menyimpulkan bahwa kompleksitas pemerintahan tidak berdampak signifikan terhadap transparansi informasi keuangan.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Dari temuan riset dan analisis diskusi yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh positif yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin transparan informasi keuangannya. Belanja daerah tidak memiliki pengaruh terhadap transparansi informasi keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa belanja daerah yang tinggi bukan merupakan faktor yang mendorong transparansi informasi keuangan, karena belanja daerah yang tinggi dapat menghambat transparansi informasi keuangan. Kompleksitas pemerintahan tidak memiliki pengaruh terhadap transparansi informasi keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa populasi bukanlah faktor yang berkontribusi terhadap transparansi informasi keuangan, karena populasi meningkatkan kompleksitas pemerintahan dan mempersulit transparansi informasi keuangan.

Keterbatasan

Berdasarkan temuan dan hasil penelitian ini, penulis memahami bahwa hasil penelitian ini belum memberikan kesimpulan yang utuh, sehingga penelitian ini masih mempunyai beberapa keterbatasan, antara lain: Variabel bebas dalam penelitian ini masih rendah dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel terikat. Akses terhadap informasi keuangan di website provinsi terbatas. Riset ini hanya menggunakan data sekunder dari LKPD yang diperiksa oleh BPK dan BPS.

Saran

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk membantu pemerintah daerah berpartisipasi dalam pengembangan peraturan internal dan eksternal pemerintah daerah, sehingga transparansi informasi keuangan daerah via *website* dapat ditingkatkan di masa depan. Peneliti berharap pada riset selanjutnya dapat menggunakan dan memasukkan variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini, seperti tingkat popularitas website pemerintah daerah, kepadatan penduduk, rata-rata usia, dan kebutuhan informasi pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, A., & Ritonga, I. T. (2018). Analysis of Local Financial Management Transparency Based on Websites on Local Government in Java. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 10(1), 13-26.
- Aggatha, N. P., Rahayu, S., & Inawati, W. A. (2023). The Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Opini Audit, Kompleksitas Pemerintah dan Kekayaan Daerah Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan pada Website Resmi Pemerintah Daerah Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2020. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 307-316.
- Alcaide Muñoz, L., Rodríguez Bolívar, M. P., & López Hernández, A. M. (2017). Transparency in governments: a meta-analytic review of incentives for digital versus hard-copy public financial disclosures. *The American Review of Public Administration*, 47(5), 550-573.
- Arumanti, N. R. (2018). Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Internal Control Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Gowa. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Alauddin Makassar*.
- Dewi, V. I. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Jumlah Penduduk, dan Opini Audit Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah. *International Journal of Social Science and Business*, 3(4), 358-366.
- Fawziah, I. N., & Arza, F. I. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Rasio Pembiayaan Utang Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2200-2213.
- Guillamón, M. D., Bastida, F., & Benito, B. (2011). The determinants of local government's financial transparency. *Local Government Studies*, 37(4), 391-406.
- Hendriyani, R. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Hiola, Y., & Harun, E. (2021). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Gorontalo. *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, 4(2), 89-101.

- Indonesia. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ/2012 Tahun 2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah.
- Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendeteksi Telematika Di Indonesia. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.
- Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.
- Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015. Sekretariat Kabinet. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LN. 2014/No. 244, TLN No. 5587. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. LN. 2022/No. 4, TLN No. 6757. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Jaya, J. D., & Sisdyani, E. A. (2014). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal pada kelengkapan pengungkapan informasi keuangan daerah melalui situs resmi pemerintah provinsi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(2), 285-303.
- Khasanah, N. L., & Rahardjo, S. N. (2014). Pengaruh karakteristik, kompleksitas, dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 864-874.
- Krah, R. D. Y., & Mertens, G. (2020). Transparency in local governments: patterns and practices of twenty-first century. *State and Local Government Review*, 52(3), 200-213.
- Naopal, F., Rahayu, S., & Yudowati, S. P. (2017). Pengaruh karakteristik daerah, jumlah penduduk, temuan audit, dan opini audit terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 7(1), 56-68.
- Ningsih, R. F. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi informasi keuangan daerah via website (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera Tahun 2015). *Jurnal Akuntansi*, 6(2).
- Puspita, R., & Martani, D. (2012). Analisis pengaruh kinerja dan karakteristik pemda terhadap tingkat pengungkapan dan kualitas informasi dalam website pemda. *Universitas Indonesia*.
- Spence, Michael. 1973. Job Market Signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 87, No. 3. (Aug., 1973), pp. 355-374.
- Styles, A. K., & Tennyson, M. (2007). The accessibility of financial reporting of US municipalities on the Internet. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 19(1), 56-92.
- Sugiyono (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta.
- Verawaty, V. (2017). Determinan Transparansi Informasi Keuangan Daerah Melalui E-Government Pemerintah Daerah Di Sumatera Selatan. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 13(2).